

**EVALUASI PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA
(SISKEUDES) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA/NEGERI
DI KOTA AMBON**

Oleh :

Linda Grace Loupatty

Jurusan Akuntansi FEB Universitas Pattimura-Ambon

lindagrace.loupatty@gmail.com

Article Info

Article History :

Received 10 April - 2022

Accepted 24 April - 2022

Available Online

30 April - 2022

Abstract

This study aims to evaluate whether the implementation of Siskeudes in villages/states in Ambon City has been running effectively, and analyzes the impact of implementing Siskeudes on villages/states in Ambon City. The conceptual framework in this study uses the effectiveness theory of Walter Jack Duncan (1981) by using indicators achievement of goals, integration and adaptation are parameters to evaluate the implementation of Siskeudes in Ambon City. This research was conducted with a descriptive qualitative approach. The types of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques are observation, interviews and documentation. The results showed that the implementation of Siskeudes in 30 villages/countries in Ambon City had been implemented well. Village financial management runs according to its procedures and provisions. Around 25 villages/countries are Leahari Country, Hutumuri Country, Rutong Country, Refinery Country, Hatalai Country, Ema Country, Hukurila Country, Naku Country, Latuhalat Country, Nusaniwe Country, Seilale Country, Urimeseng Country, Batu Merah Country, Soya Country, Village Latta, Nania Village, Waiheru Village, Halong Country, Hatiwe Besar Country, Laha Country, Rumah Tiga, Tawiri Country, Hunuth Village, Poka Village, Wayame Village have implemented village financial management procedures in an orderly and budgetary discipline. And 5 other villages, namely Negeri Amahusu, Negeri Passo, Small Hative Country, Galala Village and Negeri Lama Village, are still in the process of improving financial management to be better. In general, the implementation of Siskeudes in 30 villages/countries in Ambon City has a very positive impact, which is able to improve the performance of village financial management. It is proven that 25 villages/countries have been able to implement the Siskeudes Application although there are still many shortcomings that must be corrected. The application of Siskeudes has proven to be able to assist village officials in timely financial reporting and accountability; make the village financial management process more transparent, accountable and participatory, as well as more orderly and budgetary discipline. The Siskeudes application helps village officials in the village financial management process from the planning, implementation, administration, to reporting stages. This application is considered easy to use and has adapted to follow the development of village financial accounting principles.

Keyword :

**Effectiveness, Siskeudes,
Transparent, Accountable,
Participative**

1. PENDAHULUAN

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara Kesatuan adalah salah satu agenda prioritas Presiden Joko Widodo dalam masa kepemimpinannya. Membangun Indonesia dibutuhkan sebuah planning untuk mempermudah tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan tersebut. Planning dipermudah dengan membuat

semacam mind map sehingga arah pembangunan Indonesia menjadi jelas. Titik utama dari mind map pembangunan Indonesia adalah desa. Desa merupakan ujung tombak pemerintah dalam melakukan pembangunan. Hal ini tertuang dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Oleh karena itu, desa diberi kewenangan untuk mengatur pembangunan di wilayahnya sendiri. Desa diberi dana oleh pemerintah yang disebut Dana Desa dan

Alokasi Dana Desa untuk dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian desa.

Dana desa pertama kali dianggarkan pada tahun 2015 dengan jumlah yang sangat besar yaitu Rp. 20,7 triliun. Jumlah dana desa terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan dana desa menyimpan banyak sekali permasalahan. Telaah Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2015 sampai dengan semester I tahun 2018 pada 80 Kabupaten, 5 kota dan 1.006 kecamatan pada 33 provinsi seluruh Indonesia menemukan adanya beberapa permasalahan utama pengelolaan Dana Desa, baik dalam aspek pembinaan maupun aspek pengawasan.

Tantangan dalam pengelolaan keuangan desa adalah bahwa desa belum memiliki sumber daya manusia yang memadai dalam pengelolaan keuangan dan belum mampu menerapkan prinsip-prinsip Akuntansi Keuangan Desa dengan baik. Pengelolaan Keuangan Desa harus transparan, akuntabel dan partisipatif. Prosedur dan proses penyusunan pertanggungjawaban (SPj) masih dianggap rumit oleh aparatur Pemerintah Desa. Banyak terjadi penyelewengan dalam penggunaan/pengelolaan keuangan desa, yang mengakibatkan banyak Kepala Desa atau perangkat yang terjerat kasus hukum. Untuk itu dibutuhkan komitmen kuat aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa, demi terwujudnya desa maju, mandiri dan sejahtera. Kualitas aparatur pemerintah desa berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa (Lewaru, T. S., Loupatty, L. G., & Soepriadi, D. N., 2020)

Desa belum memiliki sumberdaya manusia yang cakap dalam penggunaan perangkat IT, ini akan menghambat proses implementasi Sistem Keuangan Desa yang terintegrasi dalam sebuah aplikasi Siskeudes. Dibutuhkan peningkatan kapasitas aparatur desa yang memadai untuk merespons program pemerintah dalam mewujudkan Nawacita ke-3 itu.

Pengelolaan keuangan desa harus didasarkan pada peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sebagai bentuk pertanggungjawaban APBDes, pemerintah desa harus menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan APBDes. Pencapaian suatu transparansi pengelolaan keuangan desa tersebut harus dapat

terwujud dengan menerapkan sebuah sistem pengelolaan keuangan desa yang diterapkan secara baik agar nantinya dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan (Indriyanti, R., dkk, 2020).

Untuk menjamin standarisasi sistem keuangan dan mengurangi resiko penyalahgunaan dana desa, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) membuat aplikasi dalam pengelolaan dana desa yaitu Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang telah dikembangkan sejak tahun 2015 (Pratiwi dan Pravasanti, 2020). Fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi Siskeudes dibuat sederhana dan user friendly sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi. Proses penginputan sekali sesuai transaksi yang ada, dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang (Kusumastuti dan Zahri, 2020).

Kelebihan aplikasi Siskeudes yaitu memudahkan tata kelola keuangan desa, dilengkapi dengan sistem pengendalian intern, mudah digunakan, berintegrasi dengan aplikasi pengelolaan dana desa lainnya. Selain itu implementasi Siskeudes memberikan dampak yang cukup baik dari segi efisiensi waktu dan biaya. Sulina dkk., (2017) mengidentifikasi kelebihan Siskeudes yaitu; 1) sesuai peraturan, 2) memudahkan tata kelola keuangan desa, 3) kemudahan penggunaan aplikasi, 4) dilengkapi dengan sistem pengendalian intern (Built-in Internal Control), 5) didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi.

Siskeudes selain mempunyai kelebihan, juga memiliki kekurangan yang menjadi masalah dalam efektivitas penerapannya. Pengguna sulit memahami aplikasi Siskeudes karena aplikasi ini masih baru dan sumber daya manusia yang belum familiar dengan aplikasi tersebut sehingga harus mengikuti banyak pelatihan. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Afrizal et al. yang menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan Desa dengan menggunakan aplikasi Siskeudes terdapat permasalahan berupa belum tersedianya SDM yang memadai dalam menggunakan aplikasi Siskeudes (Pratiwi dan Pravasanti, 2020). Hal ini juga ditegaskan Handayani (2020) yang menyatakan bahwa kendala penerapan Siskeudes adalah kualitas sumber daya manusia untuk mengoperasikan sistem ini masih terbatas. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia ini harusnya diatasi dengan pendidikan dan pelatihan yang cukup, namun Sulina dkk. (2017) mengidentifikasi kelemahan Siskeudes yaitu

kurangnya pelatihan penggunaan Siskeudes yang diberikan bagi para pegawai.

Selain masalah kualitas sumber daya manusia, faktor kemudahan dalam mengakses aplikasi Siskeudes juga turut mempengaruhi efektivitas penerapan Siskeudes. Hasil penelitian membuktikan bahwa pegawai yang mudah menggunakan sistem akan merasa lebih mudah pula memahami dan menjalankan sistem yang ada. Semakin mudah sistem dijalankan maka semakin efektif penerapan sistem tersebut yang dapat meningkatkan kinerja pemakainya (Imran, 2014). Berbagai kendala selain keterbatasan SDM juga ditemukan dalam penerapan aplikasi Siskeudes yaitu update versi aplikasi, komitmen pemerintah, dan tidak tersedianya tenaga/teknisi ahli di lingkup kecamatan (Indrianti dkk, 2020). Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dirancang untuk memudahkan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban kepala desa belum dikuasai dengan baik, sehingga mereka kesulitan dalam melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban. (Payapo, R. W & Loupatty, L. G.,2021)

Sejak diluncurkan tahun 2015, aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) wajib dipergunakan di semua Desa di Indonesia. Diawali dengan berbagai pelatihan dan Bimtek yang diselenggarakan oleh Kemendagri dan BPKP, maka diharapkan pengelolaan keuangan desa dikelola secara transparan, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran serta akuntabel. Sejak tahun 2016, semua Desa/negeri di Kota Ambon sudah menerapkan Siskeudes dalam pembuatan Rancangan APBDesa. Kota Ambon yang terdiri dari 10 Desa dan 20 Negeri (Desa Adat) saat ini sudah menggunakan Aplikasi Siskeudes online dengan versi rilis V2.R2.04 atau Siskeudes 2.0.4 yang dirilis pertama kali oleh Tim Kemendagri dan BPKP pada tanggal 20 September 2021.

Penerapan Siskeudes di Kota Ambon di awal penerapannya diperhadapkan dengan berbagai permasalahan, yaitu; bendahara dan sekretaris negeri yang mengundurkan diri di tengah jalan, aplikasi masih sebatas penyusunan realisasi anggaran saja namun sistem tersebut masih belum dioptimalisasikan penggunaannya secara real time yang artinya seluruh transaksi mulai dari permintaan uang sampai pada pencatatan dan pelaporan tidak dilakukan sesuai tanggal transaksi, terhapusnya aplikasi Siskeudes di tengah tahun anggaran akibat penggunaan laptop Siskeudes dicampur dengan pekerjaan lainnya, kurangnya pemahaman dalam penggunaan sistem, sebaiknya melibatkan pemerintah desa bagian bawah sehingga proses penyelesaian dan penggunaan

anggaran bisa berkorelasi (Latuheru dalam Intim News, 2017). Upaya pemerintah Kota Ambon telah dilakukan untuk meminimalisir kendala tersebut antara lain dengan rutin melakukan Bimtek (bimbingan teknis), namun penerapan Siskeudes masih belum maksimal.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Efektivitas

“Efektifitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki. (The Liang Gie, 1967)”. Suatu hal dikatakan efektif adalah jika suatu kegiatan yang telah dilakukan memenuhi target yang diinginkan atau tujuan yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut dikatakan Richard M. Steirs, (1985 : 2) “Bahwa makin rasional suatu organisasi, makin besar kemampuan yang diperoleh ke arah tujuan, organisasi makin efektif pula. Dengan demikian efektifitas dipandang sebagai tujuan akhir oleh sebagian besar organisasi setidaknya secara teoritis”. Definisi ini menyatakan bahwa efektifitas dimaksudkan seberapa jauh organisasi itu mencapai tujuan sebegitu jauh pula tingkat efektifitas yang telah dicapai. Berarti suatu kebijakan dapat dianggap sudah efektif apabila target dari tujuan kebijakan telah terpenuhi. Maka yang dimaksud Efektivitas Kebijakan adalah keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dicapai secara tepat waktu.

Efektivitas adalah bagian suatu standar akan terpenuhinya sebuah tujuan dan sasaran yang akan dicapai serta menunjukkan pada tingkat sejauh mana organisasi, kegiatan/program melaksanakan fungsi-fungsinya dengan optimal (Baria, 2019).

Menurut Arianto (2020), efektivitas adalah unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Sedangkan menurut Sutra dan Prabawa (2020), efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.

Efektivitas terjadi pada suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan dan untuk setiap program yang efisien, dimana dalam hal ini dapat dilihat dari hasil, tujuan, atau akibat yang dikehendaki dengan kegiatan program tersebut telah tercapai bahkan secara maksimal.

Efektivitas menunjukkan taraf terjadinya tujuan. Jadi efektivitas adalah pengaruh yang disebabkan adanya suatu aktivitas tertentu untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan yang dicapai dalam setiap tindakan yang dilakukan (Firdaus, 2017).

Agus (2015) menyatakan bahwa “efektivitas merupakan kemampuan organisasi untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan sebaik mungkin, menyangkut bagaimana melakukan pekerjaan yang benar sehingga organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.

Menurut Walter Jack Duncan, (1981) efektivitas adalah “sebuah kebijakan akan terkait dengan pemenuhan tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut, integrasi sub-sub sistem dan derajat kepuasan masyarakat”. Efektivitas menurut Duncan (1981), meliputi pencapaian hasil, integrasi dan adaptasi.

Ukuran tingkat efektivitas dikemukakan oleh Duncan dalam buku Richard Steers “Efektivitas Organisasi” (Baria 2019; Alemmantara, 2019; Yoga, 2019) adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan.

Keseluruhan upaya organisasi dalam pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu bentuk proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam segi pentahapan pencapaian bagian-bagiannya ataupun pentahapan dalam arti perodesasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari 2 sub-indikator, yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkret dalam pencapaian suatu organisasi.

2. Integrasi.

Pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus (mengenai kesepakatan bersama), dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari 2 sub-indikator, yaitu prosedur dan proses sosialisasi

3. Adaptasi.

Proses penyesuaian diri yang dilakukan individu untuk menyelaraskan dirinya terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari peningkatan kemampuan dan sarana prasarana.

Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa yang didapatkan melalui sumber pendapatan desa haruslah dikelola dengan baik demi tercapainya pembangunan desa. Melalui kebijakan dana desa, perekonomian dan

kesejahteraan masyarakat diharapkan bisa meningkat. Jadi alokasi anggaran yang disediakan pemerintah pun terus bertambah (Arianto, 2020).

Pengelolaan keuangan desa adalah suatu bentuk tahap atau proses dalam mengelola keuangan desa yang terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan desa (Malahika, 2018);

1. Perencanaan.

Perencanaan merupakan tahap perumusan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada desa yang bersangkutan. Pemerintah desa melakukan perencanaan dalam rangka pembangunan desa yang sesuai dengan kewenangannya.

2. Pelaksanaan.

Pelaksanaan keuangan desa merupakan kegiatan dari proses perencanaan yang sudah ada dan kemudian secara bertahap dilaksanakan dalam proses pembangunan desa. Untuk mencapai target pelaksanaan harus dilaksanakan dengan baik.

3. Penatausahaan.

Penatausahaan keuangan desa merupakan suatu kegiatan pada tahap ini proses penatausahaan dalam proses pembangunan desa dan laporan harus dilakukan dengan baik. Dalam tahap ini seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan dikelompokkan dan disusun dengan baik untuk dilaporkan.

4. Pelaporan.

Pelaporan keuangan desa yang dimaksud adalah tahap terakhir dari bentuk pengelolaan keuangan desa. Setelah semua proses telah selesai akan disusun dalam bentuk laporan keuangan dan kemudian akan dilaporkan kepada pihak yang bersangkutan.

Tahapan tersebut di atas sejalan dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang menyebutkan, "Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sedangkan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa" (Basri dkk, 2021)

Sistem Keuangan Desa

Sistem keuangan dana desa merupakan alat terpadu yang digunakan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan keuangan desa yang berdasarkan pada asas

efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan *auditable* (Purnama dan Puspasari, 2019)

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah (BPKP) bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) untuk membantu pemerintah desa dalam melakukan pelaporan keuangan desa yang bertujuan agar pengelolaan keuangan desa bisa lebih bersih, tertib, efektif dan efisien serta terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (BPKP, 2018 dalam Febriyani dan Suprajitno, 2020).

Aplikasi Siskeudes

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah (BPKP) yang bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) untuk membantu pemerintah desa dalam melakukan laporan keuangan desa dengan tujuan agar pengelolaan keuangan desa bisa lebih bersih, tertib, efektif dan efisien serta terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang baik dan transparan, akuntabel partisipatif serta dapat dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Febriyani dan Suprajitno 2020).

Aplikasi keuangan desa ini menggunakan database *Microsoft Acces* sehingga lebih *portable* dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun. Secara teknis transaksi keuangan desa termasuk dalam kelompok skala kecil, sehingga lebih tepat ditangani secara mudah dengan database *acces* ini. Penggunaan aplikasi dengan menggunakan database *SQL Server* hanya dikhususkan untuk tujuan tertentu atau volume transaksi sudah masuk dalam kategori skala menengah (Abdullah dan Samad, 2019).

Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi sistem keuangan desa dibuat sederhana dan *user friendly* sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa. Proses penginputan sekali dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain dokumen penatausahaan; Bukti penerimaan; Surat Permintaan Pembayaran (SPP); Surat Setoran Pajak (SSP); dan pelaporan. (Indrianti, dkk., 2020).

Dasar Hukum Siskeudes

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan suatu tonggak baru dalam sistem otonomi desa, dalam UU ini desa diberi otorisasi yang luas dalam mengelola tata pemerintah sendiri

serta termasuk dalam pelaksanaan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, pemerintah desa diberi keleluasaan untuk mengelola keuangan dan kekayaan milik desa. Penerimaan dana oleh pemerintah desa tentunya akan berdampak pada tuntutan tanggungjawab pengelolaan tersebut dari pengelola (Puspasari dan Purnama, 2018)

Pemerintah desa diwajibkan untuk menyusun laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Belanja (APB) Desa serta Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan hasil pengelolaan keuangan desa merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban kinerja terhadap masyarakat sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pengungkapan dalam bentuk laporan digunakan masyarakat untuk memberikan penilaian atas hasil kinerja aparatur desa serta sebagai media dalam menunjukkan transparansi dan akuntabilitas segala informasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa (Puspasari dan Purnama, 2018).

Demi membantu penatausahaan dana desa, maka Pemerintah Pusat (Kemendagri) bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah membuat aplikasi komputer Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang memadai dan dapat diandalkan. Melalui aplikasi ini desa memperoleh kemudahan dan kesederhanaan dalam pengelolaan keuangan desa. Penggunaan Siskeudes juga dipertegas dengan himbauan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui surat Nomor B.7508/01-16/08/2016 tertanggal 31 Agustus 2016 kepada seluruh kepala desa di Indonesia untuk memahami dengan baik dan menggunakan Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa (Yuandika dkk., 2020).

Tujuan Siskeudes

Tujuan dari Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah untuk memudahkan dalam pelaporan keuangan. Selain itu juga untuk menata suatu kelola keuangan desa secara optimal serta sebagai alat kendali/tolak ukur pengelolaan keuangan desa sehingga tidak keluar dari koridor peraturan undang-undang (Abbdulah dan Samad, 2019).

Selain itu menurut (Febriani dan Suprajitno, 2020), Siskeudes bertujuan untuk membantu pengelolaan keuangan desa bisa lebih bersih, tertib, efektif dan efisien serta terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Sedangkan Dewi dan

Julianto (2020) mengemukakan bahwa tujuan dari diciptakannya Siskeudes ialah guna memberikan bantuan dalam meningkatkan akuntabilitas Pemerintah desa dalam mengelola dana desa.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif biasanya dipaparkan secara deskriptif dengan menganalisis serta mendeskripsikan suatu fenomena, gejala dan peristiwa yang sedang terjadi sekarang. Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus mampu melihat dan berusaha untuk fokus terhadap suatu fenomena atau peristiwa yang menjadi perhatian dalam penelitian, agar peneliti mampu menguraikan secara mendalam terhadap fenomena yang terjadi.

Menurut Sugiyono (2018;213) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang lebih berfokus pada makna dan peneliti sebagai instrument, dari suatu penelitian dan berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti suatu kondisi ilmiah (eksperimen). Tujuan dari penggunaan metode penelitian kualitatif yaitu untuk mengkaji suatu fenomena atau objek dalam penelitian tersebut berdasarkan pemahaman dan sikap seseorang secara kelompok atau individu, serta suatu aktivitas sosial.

Kajian ini akan menjelaskan secara lengkap fenomena tentang efektivitas penerapan Siskeudes pada desa/negeri di Kota Ambon. Bahwa penerapan Siskeudes dimasing-masing daerah tentu akan menghadapi persoalan yang berbeda-beda, sehingga dibutuhkan kajian yang mendalam tentang apa saja permasalahan yang dihadapi desa/negeri di Kota Ambon dalam perspektif Teori Efektivitas Duncan dengan Indikator; pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

Keabsahan Data

Salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas data adalah dengan triangulasi. Triangulasi dapat dikatakan sebagai pengecekan, pengujian data dari berbagai sumber-sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Baria, 2019). Dalam penelitian ini triangulasi dilakukan dalam dua cara, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara memeriksa data/menguji data yang telah didapat melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data dan pengujian data yang sudah didapat melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, dan

membandingkan hasil dari wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara memeriksa data kepada sumber-sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya bisa benar karena mempunyai sudut pandang yang masing-masing berbeda-beda.

Teknik Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif, konseptualisasi, kategorisasi, dan deskripsi dikembangkan atas dasar “kejadian” yang diperoleh ketikakegiatan lapangan berlangsung. Karenanya, antara kegiatan pengumpulan data dan analisis data tidak mungkin dipisahkan satu sama lain. Keduanya berlangsung secara simultan, prosesnya berbentuk siklus dan interaktif, bukan linier (Rijali, 2018). Miles dan Huberman (dalam Rijali, 2018) menggambarkan proses analisis data penelitian kualitatif sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data di lapangan tentu berkaitan dengan teknik penggalan data, dan berkaitan pula dengan sumber dan jenis setidaknya sumber data dalam penelitian kualitatif berupa: (1) kata-kata dan (2) tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen atau sumber data tertulis, foto, dan statistik. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman *video/audio tapes*, pengambilan foto, atau film. Sedangkan sumber data tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi data,

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian,

permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. Reduksi data meliputi: (1) meringkas data, (2) mengkode, (3) menelusur tema, (4) membuat gugus-gugus. Caranya: seleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkannya kedalam pola yang lebih luas.

c. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

- d. Kesimpulan-kesimpulan: Penarikan/Verifikasi
Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.
Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara: (1) memikirkan ulang selama penulisan, (2) tinjauan ulang catatan lapangan, (3) tinjauan kembali dan tukar pikiran antarteman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, (4) upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Efektivitas Penerapan Siskeudes Pada Desa/Negeri Di Kota Ambon

Evaluasi efektivitas penerapan Siskeudes pada 30 desa/negeri di Kota Ambon akan menggunakan indikator-indikator Teori Efektivitas Jack Duncan (1981), yaitu pencapaian hasil, integrasi dan adaptasi. Menurut Duncan, (1981) efektivitas sebuah kebijakan akan terkait dengan pemenuhan tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut, integrasi sub-sub sistem dan

derajat kepuasan masyarakat. Menurut Kumorotomo, (2005:362) "Efektivitas adalah suatu pengukuran terhadap penyelesaian suatu pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi". Sehingga evaluasi yang dilakukan terhadap penerapan Siskeudes pada 30 desa/negeri di Kota Ambon adalah untuk mengukur sejauhmana penyelesaian program ataupun kebijakan Siskeudes ini dalam mencapai tujuan tatakelola keuangan desa yang baik, integrasi dari pihak-pihak terkait dalam menghasilkan pelaporan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, dan partisipatif serta kemampuan aparatur desa untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan tersebut.

Pencapaian Tujuan

Indikator pencapaian tujuan merupakan keseluruhan upaya aparatur desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dan ini merupakan sebuah proses panjang yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Titik krusial dalam mewujudkan Tata kelola Pemerintahan Desa yang baik yaitu dalam pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa menyimpan banyak sekali persoalan. Hal ini disebabkan desa belum siap dalam mengelola anggaran yang sangat besar. Butuh kemampuan dan komitmen aparatur desa yang bersih, jujur dan paham terhadap undang-undang serta semua aturan-aturan pengelolaan keuangan yang baik. Dilain sisi, banyak aparatur desa yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, skill yang terbatas dan pengetahuan yang kurang memadai. Sehingga butuh peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa.

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dengan berbagai pelatihan, Bimtek dan pendampingan yang intens dilakukan baik di Desa, Kecamatan maupun Kabupaten/Kota. Semua itu dilakukan semata-mata agar pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di rancang dengan tujuan untuk memudahkan desa dalam pelaporan keuangan. Aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

Penelitian ini akan mengevaluasi apakah penerapan Siskeudes di 30 Desa/Negeri di Kota Ambon sudah mencapai tujuan yang diharapkan pemerintah. Pencapaian tujuan akan meliputi

kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkrit dalam pencapaian suatu organisasi (Baria 2019; Alemmantara, 2019; Yoga, 2019). Sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa di awal implementasinya tahun 2015, desa masih kesulitan untuk mencapai target waktu pelaporan keuangan. Masih kurangnya sumberdaya manusia di desa yang paham dan handal dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes, dan belum stabilnya sistem jaringan internet sehingga operasi sistem sering mengalami gangguan teknis, masih membutuhkan intervensi dari dinas terkait dalam hal entri dan posting akun-akun.

Namun seiring berjalannya waktu, pemerintah Kota Ambon telah berupaya meningkatkan kapasitas aparatur desa agar lebih familiar dengan aplikasi Sistem Keuangan Desa, menyediakan operator Siskeudes yang handal, pendampingan yang intens dalam proses pelaporan keuangan serta pengawasan melekat terhadap pengelolaan keuangan desa.

Dari pengamatan di 30 Desa/Negeri, ditemukan bahwa Siskeudes sangat membantu aparatur desa dalam membuat pelaporan keuangan desa. Sebanyak 25 Desa/Negeri dapat menyelesaikan tahapan pelaporan keuangan tepat waktu. Waktu yang disediakan untuk mengoperasikan Siskeudes sudah sangat memadai. Dan ada beberapa desa/negeri yang belum mencapai target waktu disebabkan pada hal-hal teknis pelaksanaan, misalnya jaringan internet yang sering error, dan keterlambatan penginputan transaksi

Sebanyak 82,76% responden menyatakan bahwa Aplikasi Siskeudes sangat membantu proses pengelolaan keuangan desa menjadi lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Sedangkan 17,24 responden menyatakan Aplikasi Siskeudes cukup membantu pencapaian akuntabilitas, transparansi, partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini dikarenakan desa-desa tersebut masih menghadapi beberapa kendala teknis seperti sistem sering eror (3,45%), pemahaman tentang cara penggunaan Siskeudes belum maksimal (3,45%), sumber daya manusia (3,45%), sarana prasarana (3,45%), kendala pengoperasian jika mengganti operator Siskeudes yang baru (3,45%).

Pengelolaan Keuangan desa berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan-ketentuannya. Sekitar 25 Desa dan Negeri telah melaksanakan prosedur pengelolaan keuangan dengan tertib dan disiplin. Dan 5 desa lainnya masih dalam proses perbaikan tata kelola keuangan untuk menjadi lebih baik. Kesulitan yang ditemui hingga Siskeudes belum mampu membuat proses

pengelolaan keuangan desa menjadi lebih tertib dan disiplin anggaran adalah; pemahaman tentang Siskeudes yang belum maksimal hingga pengelolaan keuangan desa menjadi kendala dalam pelaksanaan keuangan (3,45%), sumber daya manusia (3,45%), kemampuan/pengetahuan operator (3,45%), bila ada kebijakan di luar APDes dan bertentangan dengan aplikasi (3,45%).

Integrasi

Indikator integrasi merupakan pengukuran tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus (mengenai kesepakatan bersama), dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari prosedur dan proses sosialisasi (Baria 2019; Alemmantara, 2019; Yoga, 2019).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fitur-fitur aplikasi Siskeudes sangat mudah untuk dipahami dan dioperasikan. Sebanyak 55,1 % responden dapat mengerti dengan jelas fungsi setiap fitur-fitur tersebut dan dapat mengoperasikan dengan baik. Sedangkan 44, 83% responden dapat mengoperasikan fitur--fitur aplikasi Siskeudes, tetapi masih sangat terbatas dan belum familiar. Sebanyak 25 Operator Siskeudes di 30 Desa/Negeri mengaku bahwa Aplikasi Siskeudes ini tidak sulit untuk dioperasikan dan prosedur penggunaan aplikasi cukup mudah. Sedangkan operator Siskeudes di 5 desa/negeri lainnya masih merasa cukup kesulitan dalam mengoperasikan sistem ini. Sosialisasi penerapan Siskeudes sudah dimulai sejak tahun 2015, dan akan terus digalakan di 30 desa/negeri di Kota Ambon.

Diharapkan dengan semakin banyak mengikuti pelatihan, Bimtek dan pendampingan yang lebih intens akan membantu desa-desa yang masih terkendala dalam sinergitas pengelolaan keuangan desa dapat teratasi. Pelatihan dan Bimtek harus ditingkatkan karena setiap tahun ada peningkatan versi Siskeudes. Integrasi sistem aplikasi Siskeudes yang didukung oleh kemampuan dan komitmen sumberdaya manusia yang andal menghasilkan sebuah pelaporan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif

Adaptasi

Proses penyesuaian diri yang dilakukan individu untuk menyesuaikan dirinya terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari peningkatan kemampuan dan sarana prasarana (Baria 2019; Alemmantara, 2019; Yoga, 2019). Operator Siskeudes maupun aparatur desa

wajib untuk terus meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi dengan sistem keuangan desa yang akan terus mengalami pembaharuan/perbaikan. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa 68,97% responden sudah dapat beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan aplikasi Siskeudes yang sering mengalami perubahan. Tetapi ada sekitar 31,03% masih belum dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. 62,07% responden menyatakan bahwa Siskeudes dapat menjaga keamanan data dari pihak-pihak yang merugikan seperti hacker, dan juga dari serangan virus. Sedangkan 37,93% responden belum paham soal security system dari Aplikasi Siskeudes ini. Penggunaan Aplikasi Siskeudes mampu untuk menghindari salah saji dalam laporan keuangan desa. Siskeudes mampu menyajikan data dengan cepat dan akurat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang ditemui dalam kaitan dengan peningkatan kemampuan Aplikasi Siskeudes adalah: membuat proses pembukuan lebih sederhana hingga lebih mudah dimengerti dan dipahami (3,45%), kurangnya parameter sehingga terjadi kesalahan penginputan pada bidang program/kegiatan (3,45%), kesulitan mencetak secara manual (3,45%), tidak mampu merekam data dari tahun ke tahun karena hanya 1 tahun anggaran per aplikasi (3,45%), perlu adanya pelatihan bagi operator (3,45%), sistem eror (3,45%), jenis kegiatan belum semuanya termuat dalam Siskeudes (3,45%), kebutuhan masing-masing desa tidak sama sehingga Siskeudes harus disesuaikan dengan kebutuhan desa (3,45%), sumber daya manusia/tenaga operator (6,90%), peralatan kerja/sarana prasarana (6,90%).

Sarana dan Prasarana juga merupakan faktor penting dalam penerapan Siskeudes di 30 desa/negeri di Kota Ambon. Sebanyak 25 desa/negeri menyatakan bahwa perangkat keras (komputer; laptop/desktop) yang tersedia sangat memadai untuk penerapan Siskeudes. 5 Desa lainnya masih belum di dukung oleh penyediaan sarana dan prasarana yg cukup. Ketersediaan sumberdaya manusia yang handal dalam mempergunakan aplikasi Siskeudes telah dirasakan cukup memadai di 20 Desa/Negeri di kota ambon. Dalam penerapan Siskeudes juga membutuhkan ruang kerja dan sarana penunjang yang memadai dan kondusif.

Dampak Penerapan Siskeudes Bagi Pengelolaan Keuangan Desa/Negeri di Kota Ambon

Secara umum penerapan Siskeudes pada desa/negeri di Kota Ambon memiliki dampak positif yang mampu meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa. Kota Ambon saat ini menggunakan Aplikasi Siskeudes online dengan versi rilis V2.R2.04 atau Siskeudes 2.0.4 yang dirilis pertama kali oleh Tim Kemendagri dan BPKP pada tanggal 20 September 2021. Secara rinci dampak untuk tiap indikator dapat dijelaskan sebagai berikut;

Dampak Pada Indikator Pencapaian Tujuan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Siskeudes ternyata sangat membantu perangkat desa/negeri di Kota Ambon dalam pengelolaan keuangan desa, karena pelaporan keuangan desa dapat berjalan tepat waktu, akurat dan benar, hal ini terjadi di 25 desa/negeri. Meskipun ada 5 Desa yang belum dapat mempergunakan Aplikasi Siskeudes dengan baik, Namun secara keseluruhan penerapan Siskeudes di Kota Ambon telah berjalan efektif dikarenakan indikator pencapaian tujuan, integrasi kebijakan dan adaptasi terhadap penggunaan aplikasi Siskeudes telah mencapai 82.76%. Dampak positif sangat dirasakan oleh Pemerintah Desa, karena laporan keuangan dapat dibuat lebih transparan, akuntabel dan partisipatif. Siskeudes juga membantu perangkat desa/negeri dalam pengelolaan keuangan desa menjadi lebih tertib dan disiplin anggaran.

Masih ada desa/negeri yang menghadapi kendala dalam pencapaian tujuan penggunaan Aplikasi Siskeudes di Kota Ambon. Kendala tersebut diantaranya :

- a. Kompetensi Aparatur Desa dalam penerapan Sistem Keuangan Desa
- b. Kualitas SDM yang paham IT masih kurang
- c. Penggunaan aplikasi Siskeudes belum maksimal,
- d. Proses submit atau posting hanya menjadi kewenangan operator,
- e. Sistem sering mengalami error pada saat *updating* data,
- f. Keterbatasan sarana prasarana di Desa
- g. Kurangnya pelatihan, Bimtek dan pendampingan
- h. Peraturan yang sering berubah-ubah
- i. Sering mengganti operator baru, dapat mengakibatkan pelaporan tidak tepat waktu dan pekerjaan menjadi lambat, dikarenakan operator belum familiar dengan fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi Siskeudes.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Adilla, dkk (2021) yang menyatakan bahwa kompetensi perangkat desa dan penerapan Siskeudes berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap laporan dana desa; Suryaningsih dan Adiputra (2020) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan Siskeudes; Arianto dan Kahpi (2020) yang menyatakan bahwa kurangnya SDM mempengaruhi efektivitas penerapan Siskeudes; Purnama dan Puspasari (2019) yang menyatakan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif signifikan terhadap implementasi Siskeudes; Gayatri dan Latrini (2018) yang menyatakan bahwa kompetensi SDM menentukan keberhasilan implementasi Siskeudes.

Dampak Pada Indikator Integrasi

Sebagian besar perangkat desa/negeri di Kota Ambon mengatakan bahwa fitur aplikasi Siskeudes mudah untuk dioperasikan dan prosedur penggunaan aplikasi tidak terlalu sulit untuk diterapkan. Penerapan Siskeudes bagi sebagian besar (86,21%) perangkat desa atau negeri di Kota Ambon dianggap sangat membantu proses pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan. Semua sub-sistem perangkat desa bersinergi dalam menghasilkan Laporan keuangan yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Sehingga ada kontrol dari masing-masing perangkat desa atas setiap kegiatan yang berhubungan dengan keuangan desa. Aparatur Desa harus paham Akuntansi Keuangan Desa. Setiap bukti-bukti transaksi akan menjadi dokumen pertanggungjawaban. Semua Pencatatan dalam Laporan Keuangan Desa harus didukung bukti transaksi. Dan semua tahapan di dalam pengelolaan keuangan desa akan terintegrasi ke dalam Siskeudes.

Kendala Aparatur Desa/ Negeri di Kota Ambon dalam proses integrasi sistem adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya pelatihan terkait fitur-fitur yang baru dalam aplikasi,
- b. Sistem sering error saat update aplikasi
- c. Kemampuan dan penguasaan IT masih kurang
- d. Parameter yang digunakan kadangkala belum sesuai dengan kondisi desa.

Kegiatan sosialisasi, pelatihan, Bimtek dan pendampingan hendaknya memperhatikan kebutuhan desa, antara lain;

- a. Dibutuhkan pelatihan terkait proses penatausahaan keuangan desa/negeri,
- b. Pelatihan harus dilakukan sebelum penginputan data APBDes,
- c. Cara mengekspor/mencetak hasil kerja dalam bentuk Ms.Excel versi V2.0.R2.03 atau Siskeudes V21
- d. Peningkatan kapasitas di luar daerah guna saling mengisi dengan perangkat desa lain,
- e. Update fitur parameter kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- f. Perlu ada sosialisasi dan bimtek setiap ada perubahan pada Aplikasi Siskeudes
- g. Durasi atau lamanya waktu pelatihan
- h. Materi harus sesuai dengan regulasi

Hasil penelitian untuk indikator integrasi dalam efektivitas penerapan Siskeudes pada desa/negeri di Kota Ambon juga masih diperhadapkan dengan persoalan yang sama yaitu kapasitas sumber daya manusia, ini sejalan dengan hasil penelitian yang dikemukakan sebelumnya (Adilla, dkk., 2021; Arianto dan Kahpi, 2020; Suryaningsih dan Adiputra, 2020; Indriyanti dkk, 2020; Purnama dan Puspasari, 2019; Gayatri dan Latrini, 2018).

Persoalan lainnya pada indikator integrasi adalah teknologi informasi yang sejalan dengan hasil penelitian dari Priyono (2018) yang menyatakan bahwa kecanggihan teknologi memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas penggunaan Siskeudes; Purnama dan Puspasari (2019) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat menentukan keberhasilan implementasi Siskeudes.

Upaya meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam penerapan Siskeudes masih perlu ditingkatkan lagi dengan melakukan sosialisasi, pelatihan, ataupun bimbingan teknis. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Manasikana (2019) yang menyatakan bahwa pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi Siskeudes.

Dampak Pada Indikator Adaptasi

Bagi sebagian besar perangkat desa/negeri di Kota Ambon (68,97%) , dapat beradaptasi dengan Aplikasi Siskeudes ini. Aplikasi sistem keuangan desa merupakan salah satu bentuk inovasi sistem pelaporan keuangan desa yang mengedepankan aksesibilitas, serta efektif dan efisien waktu. Aplikasi ini dikembangkan oleh BPKP agar desa-desa di seluruh Indonesia mampu menciptakan laporan keuangan yang akuntabel dan mengurangi terjadinya korupsi yang kerap dilakukan oleh

aparatus desa karena kurangnya kontrol dari pusat. Penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) ini tentu memiliki kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihan dari sistem keuangan desa (Siskeudes) ini yaitu (1) sesuai peraturan, (2) memudahkan tata kelola keuangan desa, (3) kemudahan penggunaan aplikasi, (4) dilengkapi dengan sistem pengendalian intern (Built-in Internal Control), (5) didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi. Disamping kelebihan tersebut, kelemahan dari sistem keuangan desa (Siskeudes) ini yaitu sulitnya memahami penggunaan aplikasi ini karena aplikasi yang masih baru diterapkan sehingga para operator dan aparatur desa sulit untuk mengaplikasikannya. Selain itu kurangnya pelatihan penggunaan sistem keuangan desa (Siskeudes) yang diberikan bagi para operator. (I Gusti Ayu Trisha Sulina, dkk., 2017)

Faktor-faktor yang ditemukan dalam penelitian ini, yang dianggap menjadi kendala dalam adaptasi terhadap sistem keuangan desa di Kota Ambon diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Kualitas sumber daya manusia, baik Aparatur Desa maupun operator masih belum memadai
- b. Penguasaan IT yang rendah
- c. Kurangnya parameter sehingga terjadi kesalahan penginputan pada bidang program/kegiatan
- d. Kesulitan mencetak secara manual
- e. Tidak mampu merekam data dari tahun ke tahun, hanya 1 tahun anggaran per aplikasi
- f. Sistem yang sering error
- g. Jenis kegiatan belum semuanya termuat dalam Siskeudes
- h. Kebutuhan masing-masing desa tidak sama sehingga Siskeudes harus disesuaikan dengan kebutuhan desa,
- i. Peralatan kerja (laptop) atau sarana prasarana yang kurang memadai.
- j. Sebaiknya ada ruang kerja khusus bagi operator dan Kaur Keuangan
- k. Fasilitas penunjang bagi operator harus terpisah dari operasional pelayanan Kantor Desa
- l. Minimnya Anggaran operasional

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Purnama dan Puspasari (2019) yang menyatakan bahwa kualitas data dan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi Siskeudes. Priyono (2018) yang menyatakan bahwa kecanggihan teknologi memiliki pengaruh positif terhadap efektifitas

penggunaan Siskeudes; ; Purnama dan Puspasari (2019) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat menentukan keberhasilan implementasi Siskeudes.

5. KESIMPULAN

- a. Evaluasi terhadap penerapan Siskeudes pada 30 desa/negeri di Kota Ambon dengan menggunakan indikator efektifitas Duncan meliputi; pencapaian tujuan, integrasi sistem dan adaptasi adalah bahwa Penerapan Sistem Keuangan Daerah di Kota Ambon sudah dilaksanakan dengan baik. Pengelolaan Keuangan desa berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan-ketentuannya. Sekitar 25 Desa/Negeri telah melaksanakan prosedur pengelolaan keuangan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dan 5 desa lainnya masih dalam proses perbaikan tata kelola keuangan untuk menjadi lebih baik. Implementasi Siskeudes yang baik dapat membantu menyelesaikan pengelolaan keuangan tepat waktu; dan pengelolaan keuangan desa menjadi lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Fitur-fitur aplikasi Siskeudes dianggap sangat mudah untuk digunakan dan prosedur penggunaan aplikasi tidak sulit untuk diterapkan. Siskeudes juga cukup membantu proses pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan. Siskeudes dianggap sebagai produk inovasi yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Aplikasi Siskeudes dirancang untuk dapat menjamin keamanan data dan serangan virus yang dapat merusak sistem kerja komputer, mampu menyajikan data secara akurat. Namun ada banyak hal yang menjadi catatan penting dalam penerapan Siskeudes di 30 desa/negeri di Kota Ambon, yang harus dapat diperbaiki, yaitu menyangkut ketersediaan sumberdaya manusia yang handal dalam penggunaan IT, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam pengoperasian Siskeudes (misalnya komputer atau laptop, ruangan yang terpisah, jaringan internet yang stabil), pemahaman aparatur pemerintah desa terhadap pengelolaan keuangan desa yang baik (tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban), penguasaan Aplikasi Siskeudes oleh Aparatur Pemerintah Desa dan operator, penyelenggaraan pelatihan, Bimtek dan pendampingan yang intens, menyediakan anggaran yang cukup.
- b. Secara umum penerapan Siskeudes pada 30 desa/negeri di Kota Ambon memiliki dampak yang sangat positif yang mampu meningkatkan

kinerja pengelolaan keuangan desa. Hal ini terbukti bahwa 25 desa/negeri sudah mampu menerapkan Aplikasi Siskeudes meskipun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Penerapan Siskeudes terbukti dapat membantu aparatur desa dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu; membuat proses pengelolaan keuangan desa menjadi lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta lebih tertib dan disiplin anggaran. Aplikasi Siskeudes dianggap mudah untuk digunakan dan prosedur penggunaan aplikasi tidak sulit untuk diterapkan dan telah beradaptasi mengikuti perkembangan prinsip-prinsip Akuntansi Keuangan Desa.

6. REFERENSI

- Abdullah M., dan Samad A., (2019). Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Kinerja Kepala Desa (Studi Kasus Desa Tolaka, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan). *Indonesian Journal on Information System*. 4(1):13-24.
- Adilla R., Muhammad R. N., dan Apriady A., (2021). Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa dan Penerapan Siskeudes Terhadap Kualitas Laporan Dana Desa (Suver Pada Desa-Desa Di Kecamatan Arjasari). *Indonesia Accounting Research Journal*. 1(2):261-270.
- Agus M. S., (2015). Penilaian Efektivitas Penerapan Siatim Informasi Akuntansi Berbasis Komputer Dalam Pelaporan Keuangan Pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ogan Hilir. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Allemantara, V. R. D., (2019). Efektivitas Organisasi Dewan Adat Dayak Dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang. *Governance, Jurnal S1 Ilmu Pemerintahan*.
- Arianto A., dan Kahpi A., (2020). Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*. 2(2):183-194.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Baria, K., (2019). *Efektivitas Pelayanan Kartu Macca Di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
- Basri Y. M., Marianti T.D., dan Rofika. (2021). *Pengelolaan Keuangan Desa: Analisis Faktor Yang Mempengaruhinya*. *Jurnal Akuntansi*. 8(1):34-50.
- Dewi P. A. Y. R., dan Julianto I. P., (2020). *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Desa dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Dana Desa*. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 11(2):281-292.
- Febriyani K., dan Suprajitno, D., (2020). *Analisis Pengaruh Technology Acceptance Model (TAM) Pada Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Studi Pada Pengelola Dana Desa Di Kecamatan Sruweng)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, JIMMBA*. 2(4):515-528.
- Firdaus, K., (2017). *Efektivitas Layanan Mobile Application "mLibrary" Di Perpustakaan Universitas Gadjah Mada*. Skripsi. Universitas Airlangga. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Gayatri dan Matrini M. Y., (2018). *Efektivitas Penerapan Siskeudes Dan Kualitas Laporan Keuangan Dana Desa*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*. 13(2):113-122
- Handayani T., (2020). *Evaluasi Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Desa-Desa Di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas*. Skripsi. Universitas Sriwijaya Fakultas Ekonomi.
- Imran M., Darwanis, dan Arfan, M., (2014). *Pengaruh Kemudahan Penggunaan Sistem, Kemanfaatan Sistem, dan Keahlian Komputer Terhadap Efektivitas Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintah Kota Banda Aceh*. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syah Kuala*. 3(4):54-65.

- Indrianti R., Herman M., dan Fibriyanita F., (2020). Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Kertak Empat Kecamatan Pengaron.
- Kusumastuti D. A., dan Zahri R. M. (2020). Determinan Sikap Dalam Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). *Inventory: Jurnal Akuntansi*. 4(2)155-165.
- Latuheru, A., (2017). Penggunaan Aplikasi Siskeudes Mendapat Perhatian Serius. *Intim News*. (Diakses tanggal 1 Juni 2021). <http://intim.news/2017/03/penggunaan-aplikasi-Siskeudes-dapat-perhatian-serius/>
- Lewaru, T. S., Loupatty, L. G., & Soepriadi, D. N. (2020). Analisis Pengaruh Persepsi dan Kualitas Aparatur Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 1(10), 113-143.
- Malahika J. M., Karamor H., dan Pusung R. J., (2018). Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Going*. 13(4):574-583
- Manasikana A., (2019). Pengaruh Pelatihan, Kejelasan Tujuan, dan Dukungan Atasan, Terhadap Implementasi Sistem Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Bagian Keuangan Desa Di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus). Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
- Payapo, R. W., & Loupatty, L. G. (2021). Building A Village From The Outside: A Study On The Perception And Quality Of Village Government Apparatus In Management Of Village Funds In Regions, Latest, Outside, Frontest In Moa Sub-District, Southwest Maluku Regency. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 2(6), 1616-1631.
- Pratiwi D. N., Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Penggunaan Siskeudes dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*. 20(2):217-223.
- Priyono M. E. H., (2018). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Kabupaten Brebes. Skripsi. Universitas Peradaban Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Purnama D., dan Puspasari O. R., (2019). Sistem Keuangan Desa; Studi Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Kuningan. *JRKA*, 5(2)137-145.
- Puspasari O. R., dan Purnama D., (2018). Implementasi Sistem Keuangan Desa dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Di Kabupaten Kuningan. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 2 (2):145-159
- Rijali A., 2018. Analisa Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*. 17(33):81-95
- Rivan A., dan Maksum I. R., (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Administrasi Publik*. 9(2):92-100.
- Sugiyono, (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sulina I.G.A.T., Wahyuni M. A., dan Kurniawan P. S., (2017). Peranan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus Di Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan). *Jurnal Akuntansi Program S1*, Volume 8, Nomor 2.
- Suryaningsih N. K., dan Adiputra I M P., (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa, Partisipasi Pengguna, dan *Usability System* terhadap Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). *Jurnal Akuntansi Profesi*. 11(1):34-46.
- Sutra M. A A., dan Prabawa, D K G, (2020). Pengaruh Efektivitas, Pemanfaatan dan Kesesuaian Tugas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Karyawan Koperasi Di Desa Panjer. *TIERS Informartion Technology Journal*. 1(1):19-24.
- Yuandika N., Supheni I., Budiono, dan Suwandi, (2020). Penerapan Sistem

Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Meningkatkan Penatausahaan Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 5(1):23-32.

Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta : Pranedamendia Group.